

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 341 TAHUN 2023

TENTANG

ARSIP STATIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 56 huruf c aturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, salah satu kegiatan penyusutan arsip meliputi penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.02/4104/2023 tanggal 14 September 2023 perihal Persetujuan Penyerahan Arsip Statis, Arsip Nasional Republik Indonesia telah menyetujui arsip statis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akan diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
- c. berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Arsip Statis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akan diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ARSIP STATIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

KESATU

: Menetapkan Arsip Statis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dengan keterangan dipermanenkan sesuai Jadwal Retensi Arsip yang akan diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

KEDUA

: Arsip Statis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2023 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TENTANG ARSIP STATIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG AKAN DISERAHKAN

KEPADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR : 341 TAHUN 2023 TANGGAL : 12 OKTOBER 2023

DAFTAR ARSIP STATIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Nomor	Kode	Uraian Masalah	Tahun	Tingkat	Jumlah
Berkas	Klasifikasi			Perkembangan	Arsip
1	HK.03	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan	2014	Asli	5 lembar
		Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
		Nomor 14 Tahun 2014 tentang			
		Petunjuk Pelaksanaan Penilaian			
		Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di			
		Lembaga Kebijakan Pengadaan			
		Barang/Jasa Pemerintah			
2	HK.03	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan	2015	Asli	1 sampul
		Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
		Nomor 23 Tahun 2015 tentang			
		Petunjuk Teknis Operasional			
		Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar			
		Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
3	HK.04	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan	2011	Asli	7 lembar
		Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
		Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tim			
		Kegiatan Akreditasi Lembaga			
		Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa			
		Pemerintah			
				<u> </u>	

Nomor	Kode	Uraian Masalah	Tahun	Tingkat	Jumlah
Berkas	Klasifikasi			Perkembangan	Arsip
4	HS.09.01	Surat Nomor :	2013	Asli	4 lembar
		R/1055/XII/2013/DITRESKRIMSUS			
		Tanggal 20 Desember 2013 dari			
		Kepala Kepolisian Daerah Kalsel			
		Direktur Reskrimsus kepada Kepala			
		Lembaga Kebijakan Pengadaan			
		Barang/Jasa Pemerintah Tentang			
		Permohonan Penunjukan Ahli dan			
		Ijin Pengambilan Keterangan Ahli			

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI